PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BUMN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH

Okta Arwan Diantara, Fatimah Asyari, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail

*Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,*

ABSTRAK.

Sengketa antara BUMN dan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset juga dapat disebabkan oleh perbedaan interpretasi hukum. Sebagai entitas bisnis, BUMN sering kali beroperasi dengan orientasi profit, sementara pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset digunakan untuk kepentingan publik. Penelitian ini tentang ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara BUMN dan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah. Penelitian normatif, merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian Penyelesaian sengketa antara BUMN dan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Sengketa antara BUMN dan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah terjadi akibat berbagai faktor, seperti ketidakjelasan status kepemilikan aset,

perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi, serta tumpang tindih regulasi.

Kata kunci: Sengketa, BUMN, Pengelolaan Aset Daerah.

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN STATE-OWNED ENTERPRISES AND LOCAL GOVERNMENTS IN THE MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

ABSTRACT.

Disputes between state-owned enterprises (SOEs) and local governments in asset management can also arise from differences in legal interpretation. As business entities, SOEs often operate with a profit orientation, while local governments have the responsibility to ensure that assets are used for public interest. This research examines the legal provisions governing the resolution of disputes between SOEs and the factors that lead to disputes between SOEs and local governments in regional asset management. Normative research is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to address the legal issues raised, using a legislative approach. The results of the research on the resolution of disputes between state-owned enterprises (BUMN) and local governments in the management of regional assets require an integrated approach based on applicable laws and regulations, such as Law Number 19 of 2003

on State-Owned Enterprises and Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Furthermore, disputes between BUMN and local governments in the management of regional assets occur due to various factors, such as unclear asset ownership status, conflicting interests, lack of coordination, and regulatory overlaps.

Keywords: *Dispute, State-Owned Enterprises, Regional Asset Management.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Aset daerah, yang mencakup tanah, bangunan, dan sumber daya lainnya, berfungsi sebagai penopang utama dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan aset daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika terjadi tumpang tindih kepemilikan atau pemanfaatan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah. Sengketa semacam ini tidak hanya menghambat optimalisasi aset, tetapi juga berpotensi merugikan kepentingan publik.¹

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya kejelasan mengenai status kepemilikan aset. Sebagai contoh, di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) mencatat adanya konflik kepemilikan aset antara pemerintah daerah, Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan BUMN. Permasalahan ini timbul akibat tumpang tindih klaim atas aset tertentu, yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data aset antara pihak-pihak terkait.²

Dari sisi regulasi, meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan aset negara dan daerah, implementasinya masih menghadapi kendala. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, misalnya, menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk yang dikelola oleh BUMN, tetap merupakan bagian dari kekayaan negara. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara aset yang dikelola oleh BUMN dan aset milik pemerintah daerah sering kali tidak jelas, sehingga memicu potensi sengketa.

Sengketa antara BUMN dan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset juga dapat disebabkan oleh perbedaan interpretasi hukum. Sebagai entitas bisnis, BUMN sering kali beroperasi dengan orientasi profit, sementara pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset digunakan untuk kepentingan publik. Perbedaan tujuan ini dapat menimbulkan konflik,

¹ https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/kpk-catat-sejumlah-permasalahan-pengelolaan-aset-di-kepri?utm_source diakses pada tanggal 29 Januari 2025 Pukul 22:32 Wita

² https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn?utm_source= diakses pada tanggal 29 Januari 2025 Pukul 22:35 Wita

terutama ketika kedua belah pihak memiliki klaim atas aset yang sama.³

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan aset agar dapat memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki dikelola dengan baik, dimanfaatkan secara optimal, dan dilindungi dari potensi sengketa yang dapat merugikan kepentingan publik. Upaya ini mencakup inventarisasi aset secara menyeluruh, yang bertujuan untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh aset daerah, baik yang telah digunakan maupun yang masih dalam status sengketa atau belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sertifikasi aset yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah juga menjadi aspek penting dalam penguatan legalitas aset pemerintah daerah. Banyak kasus sengketa aset bermula dari tidak adanya sertifikat atau dokumen hukum yang jelas, sehingga aset tersebut menjadi objek klaim dari pihak lain, termasuk BUMN, swasta, atau bahkan individu tertentu. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah daerah dapat memiliki dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan hak kepemilikannya serta menghindari potensi peralihan aset secara tidak sah.

Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen aset juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah

daerah perlu memastikan bahwa aparatur yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset memiliki pemahaman yang memadai terkait regulasi, administrasi, serta strategi pemanfaatan aset yang efektif dan efisien. Pelatihan, workshop, serta sertifikasi khusus di bidang manajemen aset menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, BUMN sebagai entitas bisnis yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan aset negara juga perlu memastikan bahwa operasional mereka selalu sejalan dengan regulasi yang berlaku. BUMN harus beroperasi dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Setiap aset yang dikelola oleh BUMN, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus dicatat dan dilaporkan secara jelas agar tidak menimbulkan kebingungan mengenai status kepemilikan.⁴

Selain menjaga transparansi, BUMN juga harus memiliki mekanisme mitigasi risiko terkait potensi sengketa aset dengan pemerintah daerah. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang lebih erat dengan pihak pemerintah daerah sejak awal perencanaan proyek atau pengelolaan aset tertentu. Dengan adanya kesepahaman sejak awal, potensi

³ Komariah, A. 2020. *Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Pengelolaan Aset Negara*. Kencana, Jakarta.hal.24

⁴ Saragih, R. 2021. *Hukum Pengelolaan Aset Daerah dan Tantangan Implementasinya*. Sinar Grafika, Jakarta.hal.32

perbedaan interpretasi terkait kepemilikan dan pemanfaatan aset dapat diminimalisir. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa,⁵ BUMN sebaiknya mengutamakan penyelesaian melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, yang dapat menghindarkan kedua belah pihak dari proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari alasan pemilihan judul tentang sengketa antara BUMN dengan pemerintah daerah maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah ?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara BUMN dan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah ?

C. Metode Penelitian⁶

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai

penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah.

3. Sumber Bahan Hukum

⁵ 5 Ridwan, H.R. 2011. Hukum Administrasi Negara. RajaGrafindo Persada, Jakarta.hal.43

⁶ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian. Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (berserta perubahannya dalam PP No. 28 Tahun 2020)
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tambahan, melengkapi, dan membantu penulis dalam memahami serta menjelaskan konteks yang lebih luas terkait dengan peran kepolisian dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Penyelesaian Sengketa Antara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah.

Dalam sistem hukum Indonesia, sengketa antara BUMN dan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset diatur oleh berbagai regulasi, seperti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sengketa ini umumnya muncul dalam tiga bentuk: (1) klaim kepemilikan aset karena ketidakjelasan status hukum aset, (2) penggunaan dan pemanfaatan aset tanpa prosedur yang sah, dan (3) konflik dalam perjanjian kerja sama akibat ketidaksesuaian pelaksanaan. Untuk menyelesaikannya, tersedia tiga jalur: (1) non-litigasi seperti mediasi berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014, (2) arbitrase sesuai UU No. 30 Tahun 1999, dan (3) litigasi melalui pengadilan negeri atau PTUN jika non-litigasi gagal. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, BPK, dan BPKP, memiliki peran penting sebagai pengawas dan fasilitator. Prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 19 Tahun 2003, menjadi landasan utama agar pengelolaan aset negara/daerah dapat berjalan optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

1. Klaim Kepemilikan Aset

Sengketa ini muncul ketika terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan BUMN terhadap status kepemilikan suatu aset, seperti

tanah atau bangunan. Pemerintah daerah sering kali mengklaim aset sebagai milik daerah karena diperoleh dari APBD atau tercatat dalam daftar barang milik daerah, sementara BUMN menganggap aset tersebut sebagai bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan sesuai UU No. 19 Tahun 2003. Ketidakjelasan sertifikat, dokumen legal, atau sejarah pengalihan aset memperparah persoalan ini, sehingga rawan terjadi konflik kepentingan yang berkepanjangan.

2. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset

Sengketa jenis ini terjadi ketika BUMN menggunakan aset milik pemerintah daerah tanpa melalui prosedur formal seperti perjanjian kerja sama, sewa-menyewa, atau izin penggunaan. Sebaliknya, pemerintah daerah juga kerap memanfaatkan aset yang berada dalam pengelolaan BUMN tanpa koordinasi atau persetujuan resmi. Ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum, seperti Pasal 49 UU No. 1 Tahun 2004, menimbulkan ketegangan antarlembaga dan menghambat optimalisasi aset.

3. Konflik Perjanjian Kerja Sama

Permasalahan ini timbul ketika terjadi ketidaksepakatan atas isi atau pelaksanaan perjanjian kerja sama antara BUMN dan pemerintah daerah, seperti dalam proyek pembangunan infrastruktur, pemanfaatan lahan, atau revitalisasi aset. Ketika klausul kontrak tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan atau terjadi perubahan kebijakan sepihak, maka sengketa mudah muncul. Kurangnya pengawasan dan kejelasan

kontrak sering kali memperburuk kondisi.

4. Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Metode ini mengutamakan penyelesaian damai tanpa melalui pengadilan. Mediasi merupakan bentuk umum penyelesaian ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014. Pihak ketiga, seperti kementerian teknis atau lembaga mediasi independen, dilibatkan untuk memfasilitasi dialog antara BUMN dan pemerintah daerah. Jika tercapai kesepakatan, hasil mediasi memiliki kekuatan hukum mengikat. Proses ini dinilai efisien, hemat waktu, dan menjaga hubungan baik antarlembaga.

5. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Jika mediasi gagal, arbitrase menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih formal namun tetap di luar pengadilan. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase memungkinkan pihak bersengketa menunjuk arbitrator yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan aset negara/daerah. Proses arbitrase bersifat rahasia, cepat, dan putusannya final serta mengikat. Arbitrase banyak dipilih dalam kasus sengketa dengan nilai ekonomi tinggi atau berhubungan dengan kontrak kerja sama strategis.

6. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Litigasi menjadi pilihan terakhir jika penyelesaian non-litigasi tidak membuahkan hasil. Pengadilan negeri berwenang menangani sengketa perdata seperti kepemilikan aset berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Sementara itu, jika sengketa melibatkan aspek

administratif atau tindakan pemerintah daerah yang dianggap melebihi kewenangannya, maka dapat diajukan ke PTUN berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986. Litigasi biasanya memakan waktu lama dan berbiaya tinggi, namun tetap penting untuk memberikan kepastian hukum.

7. Peran Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, memiliki kewenangan sebagai pengelola barang milik negara. Peran ini mencakup pengawasan, pemberian arahan, hingga fasilitasi penyelesaian sengketa yang melibatkan aset negara/daerah. Selain itu, lembaga seperti BPK dan BPKP melakukan audit dan evaluasi pengelolaan aset guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi penggunaan aset publik. Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci penting dalam menyelesaikan sengketa secara adil.

8. Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas

Prinsip-prinsip ini wajib dijunjung dalam setiap tahap penyelesaian sengketa. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa tindakan badan pemerintahan harus transparan, bertanggung jawab, dan adil. Dalam konteks BUMN, UU No. 19 Tahun 2003 juga mewajibkan penerapan good corporate governance (GCG) yang menjamin kepatuhan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Prinsip-prinsip ini mencegah praktik sewenang-wenang

dan meningkatkan kepercayaan antarinstansi.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Antara BUMN Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah.

Sengketa antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah umumnya disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, di antaranya ketidakjelasan status hukum dan kepemilikan aset yang seringkali tidak didukung dokumen yang lengkap, perbedaan kepentingan antara orientasi bisnis BUMN dan kepentingan pelayanan publik Pemda, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN, berikut ulasannya :

1. Ketidakjelasan Status dan Kepemilikan Aset

Salah satu penyebab utama sengketa antara BUMN dan pemerintah daerah adalah tidak jelasnya status hukum dan kepemilikan atas aset yang disengketakan. Banyak aset yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan kemudian dialihkan ke pemerintah daerah, namun proses alih kelola ini seringkali tidak disertai dengan dokumen hukum yang lengkap dan valid. Ketidakteraturan dalam dokumentasi membuat klaim kepemilikan menjadi kabur. Di satu sisi, BUMN merasa memiliki hak atas aset karena telah lama menggunakan dan mengelolanya untuk operasional bisnis. Di sisi lain, pemerintah daerah beranggapan bahwa karena aset tersebut

berada di wilayah administratifnya, maka ia berhak mengklaim sebagai milik daerah. Ketidakjelasan ini diperparah dengan lemahnya sistem inventarisasi aset secara nasional yang belum terintegrasi, sehingga sulit dilakukan verifikasi kepemilikan yang sah.

2. Perbedaan Kepentingan antara BUMN dan Pemerintah Daerah

BUMN dan pemerintah daerah memiliki tujuan dan orientasi yang berbeda dalam pengelolaan aset. BUMN sebagai entitas bisnis negara berorientasi pada efisiensi, produktivitas, dan keuntungan finansial. Sementara itu, pemerintah daerah mengutamakan penggunaan aset untuk pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah. Perbedaan kepentingan ini sering menjadi sumber konflik, terutama ketika BUMN memanfaatkan aset untuk kepentingan komersial yang dianggap kurang memberi kontribusi langsung bagi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah sering kali merasa bahwa aset tersebut seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas publik, infrastruktur sosial, atau pelayanan dasar masyarakat. Ketegangan semacam ini semakin kompleks ketika aset tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan letaknya strategis.

3. Kurangnya Koordinasi antara Pusat dan Daerah

Sengketa juga terjadi karena lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN. Aset-aset milik negara yang dikelola oleh BUMN seringkali berada di wilayah administrasi daerah, namun proses

pengambilan keputusan tentang pemanfaatannya tidak melibatkan pemerintah daerah. Misalnya, ketika BUMN mendapat izin dari kementerian teknis untuk menggunakan suatu lahan, sering kali pemerintah daerah tidak diberi informasi ataupun dilibatkan dalam proses persetujuan. Akibatnya, terjadi ketimpangan komunikasi dan ketidakpuasan dari pemerintah daerah. Padahal, dalam konteks otonomi daerah, sinergi antar level pemerintahan sangat diperlukan demi menghindari tumpang tindih kebijakan dan kewenangan dalam pengelolaan aset.

4. Tumpang Tindih Regulasi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan aset negara dan daerah serta operasional BUMN terkadang saling tumpang tindih. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa aset yang telah dialihkan ke daerah harus dikelola berdasarkan kebutuhan daerah, namun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 memberikan otonomi kepada BUMN untuk mengelola aset yang digunakan untuk kegiatan bisnis. Ketidakharmisan antar regulasi ini sering menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan kedua belah pihak untuk mempertahankan klaimnya atas aset. Situasi ini membuat proses penyelesaian sengketa menjadi rumit karena tidak ada rujukan hukum tunggal yang bisa dijadikan dasar penyelesaian.

5. Perbedaan Penafsiran terhadap Hukum

Perbedaan tafsir terhadap ketentuan hukum juga menjadi penyebab utama

munculnya sengketa. Pemerintah daerah sering kali menafsirkan bahwa aset yang terletak di dalam wilayah mereka adalah otomatis menjadi aset milik daerah. Sementara itu, BUMN berpegang pada bukti hukum dan administratif bahwa aset tersebut masih tercatat sebagai milik negara dan menjadi bagian dari neraca perusahaan.

Ketidaksamaan pemahaman hukum ini menciptakan situasi saling klaim yang sulit diputuskan tanpa campur tangan pihak ketiga seperti pengadilan atau lembaga arbitrase. Tafsir yang keliru terhadap status aset bisa memperkeruh hubungan antar lembaga dan menghambat pemanfaatan aset secara produktif.

6. Kurangnya Inventarisasi dan Dokumentasi Aset yang Baik

Masalah berikutnya yang sering muncul adalah lemahnya sistem inventarisasi dan dokumentasi aset. Banyak aset yang tidak memiliki data kepemilikan yang jelas atau tidak tercatat secara rinci dalam sistem administrasi daerah maupun pusat. Aset yang dikelola oleh BUMN kadang tidak disertai dengan sertifikat tanah atau dokumen legal lain yang bisa menjadi bukti kepemilikan yang sah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga kesulitan untuk mengajukan klaim jika tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai. Kekosongan dokumentasi ini membuka ruang interpretasi yang luas dan mempersulit penyelesaian sengketa secara cepat dan objektif.

7. Kepentingan Politik Lokal

Isu aset kerap dijadikan alat politik oleh kepala daerah atau elit lokal untuk

memperoleh simpati masyarakat. Dengan mengklaim bahwa aset milik BUMN seharusnya menjadi milik daerah, para pemimpin daerah dapat membangun citra sebagai pembela kepentingan rakyat. Namun, dalam banyak kasus, klaim semacam ini tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat. Pemanfaatan isu aset untuk kepentingan elektoral dapat memperkeruh suasana dan memperumit upaya mediasi atau negosiasi yang rasional. Kepentingan politik ini sering kali mengesampingkan aspek hukum dan teknis pengelolaan aset yang seharusnya menjadi prioritas.

8. Kurangnya Pemahaman tentang Peraturan

Kurangnya pemahaman atas peraturan dan mekanisme hukum yang mengatur pengelolaan aset juga menjadi akar persoalan. Baik dari pihak pemerintah daerah maupun BUMN, banyak yang tidak memahami secara menyeluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk prosedur alih fungsi aset, tata cara pemanfaatan aset bersama, dan mekanisme kerja sama. Ketidaktahuan ini menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat dan dapat menimbulkan klaim sepihak yang justru memperburuk konflik. Dibutuhkan peningkatan kapasitas hukum dan administratif dari aparatur pemerintah dan manajemen BUMN agar sengketa dapat diminimalkan melalui pemahaman regulasi yang sama.

Dalam menghadapi sengketa aset antara BUMN dan pemerintah daerah, terdapat dua jalur utama penyelesaian:

non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian non-litigasi mencakup musyawarah dan mediasi sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai tanpa proses hukum panjang. Jika upaya ini gagal, maka sengketa dapat dilanjutkan ke jalur litigasi melalui pengadilan. Jika yang disengketakan adalah keputusan administratif, maka perkara diajukan ke PTUN. Jika berkaitan dengan kontrak atau perjanjian perdata, maka diajukan ke Pengadilan Negeri. Selain itu, jika ada klausul arbitrase dalam perjanjian, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Permendagri No. 19 Tahun 2016 juga memberikan pedoman teknis terkait penyelesaian sengketa aset daerah. Dalam kasus yang lebih serius, BPK dan KPK dapat turut serta jika terdapat indikasi kerugian negara atau penyalahgunaan kewenangan. Mekanisme penyelesaian yang tepat dan berkeadilan sangat penting agar aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terbengkalai akibat sengketa berkepanjangan. Tumpang tindih regulasi dan perbedaan penafsiran terhadap peraturan hukum juga memperburuk situasi, karena masing-masing pihak merasa memiliki dasar hukum yang sah. Kurangnya inventarisasi dan dokumentasi aset yang akurat membuat klaim kepemilikan sulit dibuktikan, sementara kepentingan politik lokal kadang memperkeruh suasana dengan menjadikan isu aset sebagai alat pencitraan. Terakhir,

rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset baik di kalangan pejabat daerah maupun pengelola BUMN turut memperbesar potensi konflik yang tidak terselesaikan secara konstruktif.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara BUMN dan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset memerlukan pendekatan yang terintegrasi dengan landasan hukum yang kuat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase maupun jalur litigasi melalui pengadilan, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Sengketa ini umumnya dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan aset, perbedaan kepentingan antara pihak-pihak terkait, kurangnya koordinasi, serta tumpang tindih regulasi, yang diperparah oleh lemahnya inventarisasi aset dan pengaruh kepentingan politik lokal. Permasalahan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencerminkan kompleksitas administrasi dan dinamika politik, sehingga apabila tidak ditangani secara menyeluruh dan kolaboratif, berpotensi menghambat pembangunan

daerah serta mengurangi efektivitas pengelolaan aset negara secara keseluruhan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, M. 2019. *Manajemen Aset Daerah dan Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Djuanda, A. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Harahap, S. S. 2010. *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2000. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Cet. II; Desindo Putra Mandiri, Depok.
- Hadi, S. 2021. *Praktik Corporate Social Responsibility pada Badan Usaha Milik Negara*. Gramedia. Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok
- Komariah, A. 2020. *Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Pengelolaan Aset Negara*. Kencana, Jakarta.

- Kurniawan, D. 2018. *Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Pengelolaan Aset Negara*. Sinar Grafika, Jakarta
- Muchsan. 2006. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Munandar, A. 2018. *Manajemen Aset: Teori dan Praktik dalam Pengelolaan Keuangan*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurhadi, A. & Setiawan, M. 2020. *BUMN dan Tantangan Pengelolaan Aset Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Prabowo, H. 2014. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ridwan, H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saragih, R. 2021. *Hukum Pengelolaan Aset Daerah dan Tantangan Implementasinya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suryanegara, B. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*. Penerbit RajaGrafindo, Jakarta.
- Suryadi, D. 2019. *Strategi Pengelolaan BUMN di Era Globalisasi*. Kencana. Jakarta.
- Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Wahyudi, R. 2020. *Hukum Keuangan Publik dan Manajemen Aset*. Kencana, Jakarta..

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (beserta perubahannya dalam PP No. 28 Tahun 2020)

Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah..

Sumber lainnya

https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/kpk-catat-sejumlah-permasalahan-pengelolaan-aset-di-kepri?utm_source=

https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn?utm_source=